

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU DENGAN SATU PENULIS

Bismar Nasution, “*Rezim Anti-Money Laundering Di Indonesia*”, (Bandung: Books Terrace & Library Pusat Informasi Hukum Indonesia), 2005.

H. Sutrisno dan Wiwin Yulianingsih, “*Etika Profesi Hukum*”, (Yogyakarta: CV ANDI OMSET), 2016.

Habib Adjie, “*Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*”, (Bandung: Rafika Aditama), 2008.

Munir Fuady, “*Perbuatan Melawan Hukum–Pendekatan Kontemporer*”, (Bandung: Citra Aditya Bakti), 2002.

Ridwan HR, “*Hukum Administrasi Negara*”, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada), 2008.

B. BUKU DENGAN DUA PENULIS

Sjaifurrachman dan Habib Ajie, “*Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*”, (Bandung: Mandar Maju), 2011.

C. BUKU CETAKAN KE-2 DST.

Habib Adjie, “*Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*”, (Bandung, PT. Refika Aditama), Cetakan Ketiga, 2013.

Herlien Budiono, “*Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*”, (Bandung: PT. CITRA ADITYA BAKTI), Cetakan ke II, 2014.

- R. Wirjono Prodjodikoro, “Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata, (Bandung: CV. Mandar Maju), Cetakan Pertama Edisi Revisi, Oktober 2018.
- Subekti, “Hukum Perjanjian”, (Jakarta: PT. Intermedia), Cetakan Keduapuluh tujuh, 2014.
- Tan Thong Kie, “Studi Notariat & Serba-Serbi Praktek Notaris”, (Jakarta: PT. ICHTIAR BARU VAN HOEVE), Cetakan Ketiga, 2013.
- Yenti Garnasih, “Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang Dan Permasalahannya Di Indonesia”, (Depok: Rajawali Pers), Cetakan Keempat, 2017.

D. ARTIKEL DI JURNAL

- Adi Maja, “Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Sebagai Pelapor Tindak Pidana Pencucian Uang” (Online), Jurnal Jurusan Fakultas Hukum, Universitas Narotama Surabaya.
- Rina Candra Noor Santi, “Identifikasi Biometrik Sidik Jari Dengan Metode Faktral” (On line), Jurnal Teknologi Informatika DINAMIK, Volume XIII, No. 1, Januari 2018.

E. ARTIKEL DI KORAN/WEBSITE

- Berita Dirjen AHU, “GRIPS Penting Bagi Notaris untuk Cegah TPPU” (On line), tersedia di [www: http://m.beritahukum.com/detail_berita.php?judul=Dirjen%20AHU:%20GRIPS%20Penting%20Bagi%20Notaris%20untuk%20Cegah%20TPPU](http://m.beritahukum.com/detail_berita.php?judul=Dirjen%20AHU:%20GRIPS%20Penting%20Bagi%20Notaris%20untuk%20Cegah%20TPPU)
- Berita Dkatadata,.co.id., “174 Pejabat/Swasta Tertangkap Tindak Pidana Korupsi pada 2018” (On line) tersedia di [www: https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/12/04/174-](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/12/04/174-)

pejabatswasta-tertangkap-tindak-pidana-korupsi-pada-2018 (tanggal 12 Maret 2019).

Halimatus Sa'diyah, "Draft RUU Pembatasan Transaksi Tunai Selesai Dibahas" (Online), tersedia di [www: https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/07/25/oavh1d354-draf-ruu-pembatasan-transaksi-tunai-selesai-dibahas](http://www.nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/07/25/oavh1d354-draf-ruu-pembatasan-transaksi-tunai-selesai-dibahas)

Hendra Kusuma, "Calon Pemimpin PPATK diminta relisasikan 2 RUU" (Online), tersedia di [www: https://economy.okezone.com/read/2016/10/06/320/1507961/calon-pemimpin-ppatk-diminta-realisasikan-2-ruu](http://www.economy.okezone.com/read/2016/10/06/320/1507961/calon-pemimpin-ppatk-diminta-realisasikan-2-ruu)

Kiagus Ahmad Badaruddin, "Indonesia Resmi Menjadi Observer Financial Action Task Force" (Online), tersedia di [www: http://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/808/indonesia-resmi-menjadi-observer-financial-action-task-force.html](http://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/808/indonesia-resmi-menjadi-observer-financial-action-task-force.html)

Kristian Erdianto, "UU Perampasan Aset Koruptor diusulkan masuk paket Reformasi Hukum" (Online), tersedia di [www: https://nasional.kompas.com/read/2016/09/28/17480871/uu.perampasan.aset.koruptor.diusulkan.masuk.paket.reformasi.hukum](http://www.nasional.kompas.com/read/2016/09/28/17480871/uu.perampasan.aset.koruptor.diusulkan.masuk.paket.reformasi.hukum)

Laurensius Marshall Sautlan Sitanggang, "Tangkal aksi pencucian uang, OJK gandeng PPATK dan Kementerian Dalam Negeri" (Online), tersedia di [www: https://keuangan.kontan.co.id/news/tangkal-aksi-pencucian-uang-ojk-gandeng-ppatk-dan-kementerian-dalam-negeri](http://www.keuangan.kontan.co.id/news/tangkal-aksi-pencucian-uang-ojk-gandeng-ppatk-dan-kementerian-dalam-negeri)

Registrasi GRIPS (Online), bisa lihat di [website: https://www.ini.id/post/registrasi-grips](http://www.ini.id/post/registrasi-grips)

F. TESIS

Helmi Fariska Rahma, “Tanggung Jawab Dan Akibat Hukum Notaris Dalam Melakukan Identifikasi Dan Verifikasi Data Pengguna Jasa Dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017”, (Online), Fakultas Hukum Jurusan Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan, Universitas Islam Indonesia, 2018.

Made Riyaldi, Bambang Winarno, Abdul Rachmad Budiono, “Urgensi Pengaturan Notaris Dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sebagai Pihak Pelapor Atas Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait Tindak Pidana Pencucian Uang”, (Tesis M.Kn., Universitas Brawijaya).

G. MAKALAH YANG DIBAWAKAN DALAM PERTEMUAN SEMINAR

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), “Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Dan Pelaporan Bagi Pihak Pelapor dan Pihak Lainnya”, Modul Bagian Kedua: Pemenuhan Kewajiban Pelaporan Bagi Pihak Pelapor.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), “Prinsip Mengenali Pengguna Jasa dan Pelaporan Bagi Pihak Pelapor dan Pihak Lainnya”, Modul Bagian Ketiga: Pemenuhan Kewajiban Pelaporan Bagi Pihak Pelapor.

H. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, SURAT EDARAN, LAMPIRANNYA

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitan Undang-Undang Hukum Acara Perdata.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1999 tentang
Perkretaapian.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa
Konstruksi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi,
Dan Nepotisme.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan
Notaris.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas Dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 tentang
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan
Notaris.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa
Konstruksi.

Lembaran Negara RI Tahun 2010 No. 122 dan Tambahan Lembaran Negara
RI No. 5164 (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun
2010).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol.: 17 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pemberian Perlindungan Khusus Terhadap Pelapor Dan Saksi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang.

Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: PER-11/1.02/PPATK/06/2013 tentang Indikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan.

Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: PER-02/1.02/PPATK/02/15 tentang Kategori Pengguna Jasa Yang Berpotensi Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Profesi.

Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Penghentian Sementara Dan Penundaan Transaksi Oleh Penyedia Jasa Keuangan.

Lampiran Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 2/4/KEP.PPATK/2003, tentang “Pedoman Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan”, Edisi Pertama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor SE/03/M.PAN/01/2005 Perihal Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN).

Surat Edaran Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 4/SE/I/2015 tentang Batasan Usia Dewasa Dalam Rangka Pelayanan Pertanahan.

Surat Edaran Nomor SE-03/1.02/PPATK/05/15 tentang Indikator Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan.

Lampiran Surat Edaran Nomor 14/38/DASP tanggal 28 Desember 2012 Perihal Pedoman Standar Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran Selain Bank.

I. NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA/MEMORANDUM OUT STANDING (MOU), SURAT-SURAT

Nota Kesepahaman antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Ikatan Notaris Indonesia Nomor 01/MOU/PP-INI/V/2006 tentang Pemberian atau Penolakan Pembinaan Dan Peningkatan Profesionalisme di bidang penegakan hukum.

Surat Keputusan Majelis Pengawas Pusat Nomor C-MPPN.03.10-15 tentang Pemberian atau Penolakan Persetujuan Pemanggilan Notaris oleh penyidik, penuntut umum dan hakim.

Surat Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Kepala Nomor: T/374/PN.01.02/XII/2018 Tanggal 17 Desember 2018 Perihal Penyampaian Informasi Penetapan Profesi Sebagai Pihak Pelapor Dalam Rezim Anti Pencucian Uang.

J. KAMUS

Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka), Cetakan Ketiga, 1990.

Kamus Bahasa Inggris

Kamus Besar, “Pencucian Uang” (Online), tersedia di [www: https://www.kamusbesar.com/pencucian-uang](http://www.kamusbesar.com/pencucian-uang)

K. WAWANCARA

Benny Djaja, wawancara dengan Penulis, Kampus Universitas Tarumanagara, pada hari Sabtu, tanggal 4 Mei 2019.

Munir Fuady, wawancara dengan Penulis, Kampus Universitas Tarumanagara pada hari Senin, tanggal 15 April 2019.

Robintan Sulaiman, wawancara dengan Penulis, Kantor RSPLAW Auditor,
pada hari Rabu, tanggal 24 April 2019.